

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Definisi dan Gambaran Umum

Kemiskinan merupakan salah satu isu sosial dan ekonomi yang paling mendesak di dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Yani et al., 2024). Fajarini et al., (2021) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi tersebut, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lainnya yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa ahli, seperti, Sen, (1999) memperluas definisi kemiskinan sebagai kekurangan kapabilitas—bukan hanya rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya pilihan dan kebebasan seseorang untuk menjalani hidup yang mereka inginkan.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum konsumsi makanan dan non-makanan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan standar minimum konsumsi kalori harian (2100 kkal per kapita per hari) serta kebutuhan dasar lainnya, seperti pakaian, perumahan, pendidikan, dan transportasi (Mukhtar et al., 2019). Sementara World Bank mengidentifikasi kemiskinan sebagai kondisi

di mana seseorang hidup dengan pendapatan di bawah \$2,15 per hari, yang dikenal sebagai garis kemiskinan internasional. Selain itu, definisi kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut: Mengacu pada kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan secara objektif berdasarkan standar hidup minimum (Pratiwi et al., 2022).
- b. Kemiskinan relatif: Mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat tertentu (Adawiyah, 2020). Mereka tetap dianggap miskin relatif karena berada di bawah standar yang diterima secara sosial di masyarakat tempat mereka tinggal.

Multidimensional Poverty Index (MPI), yang dikembangkan oleh Alkire dan Santos serta digunakan oleh UNDP, mengukur kemiskinan berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Handayani, 2022). Indikatornya mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan dasar, dan kualitas tempat tinggal. Contohnya, meskipun seseorang memiliki pendapatan memadai, jika ia tidak memiliki akses pendidikan yang layak, ia tetap dikategorikan miskin secara multidimensi. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga mencakup akses ke layanan dasar yang memengaruhi kualitas hidup.

2.1.1.2 Teori – Teori Kemiskinan

Dalam memahami penyebab kemiskinan, berbagai teori telah disampaikan oleh para ahli, yang mencoba menjelaskan akar penyebab kemiskinan dari sudut pandang individu maupun struktur sosial yang lebih luas, antara lain:

a. Teori Individualis

Teori individualis menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karakteristik individu, seperti kurangnya pendidikan, keterampilan, dan motivasi (Adawiyah, 2020). Salah satu teori utamanya, subkultur kemiskinan oleh Oscar Lewis, menjelaskan bahwa individu miskin cenderung mengembangkan pola perilaku dan nilai-nilai yang memperkuat kondisi kemiskinan mereka (Calnitsky, (2018). Misalnya, hidup tanpa perencanaan jangka panjang dan ketergantungan pada bantuan sosial. Nilai-nilai ini membentuk “subkultur kemiskinan” yang diwariskan antar generasi, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputuskan.

b. Teori Struktural

Teori Struktural menyoroti faktor di luar kendali individu, seperti sistem ekonomi dan sosial yang tidak adil, sebagai akar penyebab kemiskinan dan ketimpangan (Pratiwi et al., 2022). Dalam pandangan ini, kemiskinan dihasilkan dari struktur sosial yang mengatur distribusi kekayaan dan peluang secara tidak merata (Adawiyah, 2020). Karl Marx memandang kemiskinan sebagai dampak eksploitasi dalam kapitalisme, menciptakan kemiskinan yang hanya bisa diatasi melalui perubahan sistemik yang radikal. Sementara Amartya Sen, melalui pendekatan kapabilitas, menekankan bahwa kemiskinan bukan sekedar rendahnya pendapatan, tetapi ketidakmampuan individu mengakses peluang dan sumber daya. Maziyyah & Arif, (2022) menambahkan bahwa kemiskinan terjadi ketika individu kehilangan kebebasan menentukan hidupnya akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau ekonomi.

c. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*)

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan cenderung memperkuat dirinya sendiri melalui mekanisme yang saling terkait. Yacoub et al., (2023) menyatakan bahwa individu atau kelompok yang hidup dalam kemiskinan cenderung menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Akibatnya, mereka tidak dapat meningkatkan produktivitas, yang kemudian membatasi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi sehingga berdampak memperpanjang kondisi kemiskinan (Azizah et al., 2024). Tanpa intervensi yang tepat, siklus ini berpotensi terus berulang antar-generasi, menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.1.3 Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: ekonomi, sosial, dan kultural.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama kemiskinan dan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan banyak individu tidak memiliki pekerjaan layak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penyebabnya meliputi kurangnya keterampilan, ketidakstabilan ekonomi, dan stagnasi

industri (Ariasih & Yuliarmi, 2021). Menurut Azizah et al., (2024) akibatnya adalah ketimpangan memburuk, daya beli menurun, dan kemiskinan meningkat karena ketiadaan penghasilan menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup.

- Inflasi

Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Hal ini berkontribusi pada kemiskinan, karena individu tidak mampu membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk bertahan hidup.

- Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan sebagian kecil populasi menguasai kekayaan, sementara kelompok lainnya hidup dalam kemiskinan. Fajarini et al., (2021) menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya yang tidak merata menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang, dengan penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah. Muhammad et al., (2021) menambahkan bahwa ketimpangan ini sering kali menciptakan kesenjangan yang sulit untuk diatasi, karena kelompok terpinggirkan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam penyebab kemiskinan, antara lain:

- Diskriminasi Sosial

Ketidaksetaraan gender, ras, dan etnis kerap meminggirkan kelompok tertentu dari akses pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya (Adawiyah, 2020).

Perempuan, misalnya, menghadapi diskriminasi di pasar kerja yang menyebabkan upah rendah dan terbatasnya peluang kerja. Diskriminasi etnis juga menghalangi akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak.

- Hambatan dalam Akses Pendidikan

Pendidikan berkualitas adalah kunci peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Namun, kelompok marginal sering menghadapi hambatan seperti biaya tinggi hingga diskriminasi (Yani et al., 2024). Akses pendidikan yang terbatas menurunkan keterampilan dan memperpanjang siklus kemiskinan.

c. Faktor Kultural

Faktor kultural berkaitan dengan nilai, norma, dan pola pikir yang dianut oleh masyarakat dan dapat memperkuat siklus kemiskinan, antara lain:

- Nilai-nilai Masyarakat Miskin

Oscar Lewis mengemukakan konsep "budaya kemiskinan," di mana sikap dan perilaku tertentu menghambat individu keluar dari kemiskinan (Yani et al., 2024). Ketergantungan pada bantuan sosial, misalnya, dapat mengurangi motivasi untuk berusaha lebih keras. Selain itu, rendahnya dorongan untuk mengejar pendidikan atau pekerjaan sering kali diperkuat oleh norma sosial yang menganggap kemiskinan sebagai takdir.

- Kurangnya Dukungan Sosial

Masyarakat miskin sering kekurangan jaringan sosial yang mendukung mobilitas ekonomi. Minimnya akses ke komunitas atau sumber daya menyebabkan isolasi dan keterbatasan peluang untuk memperbaiki kondisi hidup mereka (Adawiyah, 2020).

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.2.1 Definisi dan Gambaran Umum

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu (Sari, 2021). TPT dihitung dari individu berusia 15 tahun ke atas yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan, sering kali akibat minimnya kesempatan, ketidakcocokan keterampilan, atau kondisi ekonomi yang buruk.

Menurut Badan Pusat Statistik, TPT menjadi indikator utama kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu negara. Fluktuasinya dipengaruhi oleh siklus ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Azizah et al., (2024) menekankan bahwa semakin tinggi TPT, semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap sehingga dapat menurunkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kemiskinan, serta memicu masalah sosial seperti kejahatan dan ketidakstabilan sosial.

TPT dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Rumus ini menunjukkan bahwa TPT dipengaruhi oleh dua faktor utama: jumlah penganggur dan total angkatan kerja. Jika jumlah penganggur meningkat tanpa disertai pertumbuhan lapangan kerja yang sebanding, TPT akan naik.

2.1.2.2 Kategori Pengangguran

Pengangguran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran sementara akibat transisi individu antara pekerjaan, seperti lulusan baru yang mencari kerja atau pekerja yang berpindah ke posisi lebih baik. Djafar, (2023) memandang bahwa hal ini merupakan bagian alami dari dinamika pasar tenaga kerja, di mana individu memerlukan waktu untuk menemukan posisi yang sesuai dengan keterampilan dan harapan mereka. Jiménez et al., (2022) mengatakan bahwa kecepatan pencarian kerja dipengaruhi oleh akses informasi, jaringan sosial, dan teknologi. Meski umumnya tidak dianggap serius, tingginya pengangguran friksional dapat menandakan ketidakefisienan pasar tenaga kerja dan memerlukan perhatian pemerintah.

b. Pengangguran Struktural

Djafar, (2023) menjelaskan bahwa pengangguran struktural terjadi akibat ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus berubah, dan pekerja harus beradaptasi untuk tetap relevan. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang harus responsif terhadap kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan ulang dan pendidikan vokasi berperan penting dalam membantu pekerja memperoleh keterampilan baru (Jiménez et al., 2022). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri diperlukan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dan menyusun kurikulum yang relevan.

c. Pengangguran Siklikal

Konsep pengangguran siklis menjelaskan bahwa pengangguran berfluktuasi sesuai siklus ekonomi yang mencakup periode ekspansi dan resesi (Rianda, 2020).

Saat resesi, permintaan *agregat* menurun, menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan menghentikan pekerja untuk menekan biaya, sehingga pengangguran meningkat. Sebaliknya, selama ekspansi ekonomi, permintaan barang dan jasa meningkat, mendorong perusahaan memperluas produksi dan membuka lapangan kerja, yang kemudian menurunkan pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran siklis, diperlukan kebijakan *countercyclical*, seperti penurunan suku bunga oleh bank sentral guna merangsang investasi dan konsumsi, serta stimulus fiskal dari pemerintah melalui peningkatan belanja publik dan pemotongan pajak untuk mendukung permintaan *agregat* dan pertumbuhan ekonomi.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berkala akibat perubahan musim atau siklus tahunan dalam perekonomian. Sukawati et al., (2022) menyebut bahwa jenis pengangguran ini umum terjadi di sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan, di mana permintaan tenaga kerja meningkat pada waktu-waktu tertentu dan menurun setelahnya. Misalnya, pekerja pertanian dibutuhkan selama masa panen, tetapi setelah panen selesai, banyak yang kehilangan pekerjaan.

e. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah istilah yang menggambarkan kondisi di mana individu yang ingin bekerja tidak dihitung dalam statistik resmi. Ini mencakup pekerja yang telah menyerah mencari pekerjaan setelah kesulitan menemukan yang sesuai, serta mereka yang bekerja paruh waktu tetapi ingin bekerja penuh waktu (Ardian et al., 2021). Pekerja terjebak dalam pekerjaan yang

tidak memadai—yaitu yang tidak sesuai dengan keterampilan atau jam kerja yang cukup—juga termasuk dalam kategori ini. Pengangguran tersembunyi sering menjadi indikasi masalah mendalam dalam perekonomian, seperti ketidakseimbangan antara penyediaan keterampilan dan kebutuhan pasar.

2.1.2.3 Teori- Teori Pengangguran

Berbagai teori pengangguran telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi untuk menjelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya pengangguran, antara lain:

a. Teori Keynesian

Teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menjadi dasar utama dalam analisis makroekonomi, terutama terkait pengangguran. Keynes berpendapat bahwa pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya usaha individu dalam mencari pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, khususnya permintaan *agregat*—total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu (Fajarini et al., 2021). Ketika permintaan *agregat* tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia, pengangguran meningkat (Jacobus et al., 2022). Dalam kondisi resesi, penurunan konsumsi dan investasi melemahkan permintaan barang dan jasa, mendorong perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja.

Keynes menekankan bahwa penurunan permintaan agregat dapat memicu kontraksi ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan pengangguran (Fajarini et al., 2021). Lebih lanjut, Ia mengusulkan bahwa peningkatan belanja publik dan investasi pemerintah dapat merangsang permintaan serta menciptakan lapangan kerja (Eichengreen, 2020). Selain itu, pemotongan pajak dapat meningkatkan daya

beli konsumen, mendorong konsumsi, dan mengurangi pengangguran. Penerapan teori Keynesian terbukti relevan selama krisis keuangan global 2008, ketika berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, menerapkan stimulus fiskal besar untuk meningkatkan permintaan (Eichengreen, 2020). Kebijakan ini meliputi peningkatan belanja infrastruktur, dukungan industri, dan insentif konsumen.

b. Teori dualisme pasar tenaga kerja

Teori dualisme pasar tenaga kerja, yang diperkenalkan oleh Michael Todaro dan Albert O. Hirschman, membagi pasar tenaga kerja menjadi dua segmen: formal dan informal. Pasar formal diatur ketat dengan upah lebih tinggi serta perlindungan kerja, sementara pasar informal cenderung tidak terstruktur, dengan upah rendah dan kondisi kerja yang kurang layak. Pengangguran sering terjadi di pasar formal ketika individu tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi mereka, sementara pekerja di pasar informal sering terjebak dalam pekerjaan yang tidak memadai tanpa jaminan kesejahteraan.

Teori ini menunjukkan bahwa pemisahan antara pasar formal dan informal menciptakan tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Meskipun pasar formal menawarkan peluang yang lebih baik, akses ke pasar ini terbatas oleh faktor pendidikan, pengalaman, dan jaringan. Di sisi lain, pekerja di sektor informal sering tidak terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, dengan kondisi kerja buruk dan pendapatan yang tidak menentu. Teori ini menekankan pentingnya kebijakan yang memperbaiki kondisi kerja di sektor informal serta meningkatkan akses ke pekerjaan layak melalui reformasi pendidikan, perlindungan hukum, dan peluang untuk transisi ke sektor formal.

2.1.3 Kontribusi Pendapatan Perempuan

2.1.3.1 Definisi dan Gambaran Umum

Kontribusi pendapatan perempuan merujuk pada bagian pendapatan keluarga yang dihasilkan perempuan melalui aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Selain menambah pendapatan rumah tangga, hal ini juga mencerminkan perubahan peran gender, di mana perempuan semakin diakui sebagai bagian penting dalam perekonomian. Susilo et al., (2024) menyatakan bahwa pendapatan perempuan sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Dari perspektif makroekonomi, kontribusi pendapatan perempuan memiliki implikasi yang signifikan. Peningkatan partisipasi perempuan di sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan layanan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga meningkatkan produktivitas nasional, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan (Maziyyah & Arif, 2022). Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana perempuan memainkan peran sentral dalam restrukturisasi ekonomi dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.2 Pengukuran Kontribusi Pendapatan Perempuan

Salah satu cara yang paling sederhana untuk menghitung kontribusi ini adalah melalui rumus berikut:

$$\text{Kontribusi Pendapatan Perempuan (\%)} = \left(\frac{\text{Pendapatan Perempuan}}{\text{Total Pendapatan Rumah Tangga}} \right) \times 100\%$$

Rumus ini mengukur proporsi pendapatan perempuan dalam total pendapatan rumah tangga, menggambarkan peran perempuan dalam perekonomian keluarga. Analisis ini penting untuk menilai kontribusi perempuan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi serta perubahan peran gender dalam ekonomi. Dengan rumus ini, dampak kebijakan dan perubahan lapangan kerja terhadap kontribusi perempuan dapat dievaluasi.

Rumus ini juga relevan untuk menilai dampak kebijakan publik, di mana kebijakan yang memperluas akses perempuan ke pekerjaan formal dapat memperbesar proporsi pendapatan mereka dalam rumah tangga, memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga. Sebaliknya, kebijakan perlindungan bagi pekerja informal dapat meningkatkan stabilitas pendapatan perempuan dan mengurangi risiko ekonomi rumah tangga. Selain itu, analisis kontribusi pendapatan perempuan menjadi indikator penting dalam menilai dinamika sosial-ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro. Di tingkat mikro, proporsi pendapatan perempuan mencerminkan perubahan pola pengeluaran, seperti alokasi yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan (Muhammad et al., 2021). Di tingkat makro, peningkatan kontribusi pendapatan perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan.

2.1.3.3 Teori – Teori Kontribusi Pendapatan Perempuan

Teori-teori kontribusi pendapatan perempuan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran perempuan dalam perekonomian, antara lain:

a. Teori Peran Ganda (*Double Burden Theory*)

Teori Peran Ganda (*Double Burden Theory*) mengacu pada situasi di mana perempuan menjalankan dua peran yang sering kali bertentangan, yakni peran domestik (sebagai ibu dan pengurus rumah tangga) serta peran publik (sebagai pekerja). Teori ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan tuntutan profesional. Konsep ini diperkenalkan oleh Arlie Russell Hochschild dalam *The Second Shift*, yang menjelaskan bahwa beban ganda tidak hanya membatasi waktu dan energi perempuan untuk pekerjaan produktif, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Maziyyah & Arif, (2022) menekankan bahwa banyak perempuan tetap harus mengerjakan tugas domestik, seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak, setelah menyelesaikan jam kerja. Kondisi ini meningkatkan risiko kelelahan dan stres, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas serta kualitas hidup mereka.

Ge et al., (2022) menyatakan bahwa dilema waktu yang dialami perempuan sering memperburuk ketidakadilan gender dalam distribusi tugas domestik. Di banyak budaya, tanggung jawab rumah tangga masih dianggap sebagai tugas utama perempuan, meskipun mereka juga berkontribusi secara finansial. Hal ini menciptakan konflik antara partisipasi di dunia kerja dan kewajiban memenuhi harapan sosial sebagai pengurus rumah tangga. Akibatnya, perempuan sering harus memilih antara mengejar karir atau tanggung jawab domestik, yang berdampak pada pengembangan karier dan peluang lebih lanjut (Maziyyah & Arif, 2022). Selain itu, pendapatan perempuan umumnya digunakan untuk kebutuhan keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan (Muhammad et al., 2021). Namun, beban

domestik yang berlebih sering memaksa mereka mengurangi jam kerja, sehingga menurunkan kontribusi ekonomi mereka. Pekerjaan domestik yang tidak dibayar, meskipun esensial, tetap tidak diakui dalam sistem ekonomi formal.

Di masyarakat progresif, pengakuan terhadap peran ganda perempuan telah mendorong kebijakan yang lebih mendukung, seperti cuti melahirkan dan akses ke fasilitas penitipan anak. Kebijakan ini memungkinkan perempuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan (Yacoub et al., 2023). Dengan memberdayakan perempuan untuk mengambil peran aktif di dunia kerja, mereka berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Zafar et al., 2024).

Dukungan terhadap perempuan dalam menghadapi beban ganda bukan sekadar aspek moral, tetapi juga investasi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan tidak hanya memperkuat inklusivitas sosial, tetapi juga mengubah persepsi gender serta mempercepat terciptanya kesetaraan. Kesadaran akan peran krusial perempuan dalam perekonomian dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Muhammad et al., 2021).

b. Teori Ekonomi Feminis

Teori ekonomi feminis adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana gender mempengaruhi distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan peran perempuan dalam ekonomi. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan ekonomi

tradisional yang cenderung mengabaikan peran penting perempuan dalam perekonomian. Marilyn Waring, dalam bukunya "*If Women Counted*", mengkritik pengukuran ekonomi konvensional yang tidak menghitung kontribusi perempuan dalam sektor informal dan pekerjaan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa pekerjaan tak berbayar, seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, memiliki nilai ekonomi tetapi sering terabaikan dalam statistik resmi.

Sen, (1999) di sisi lain, memperkenalkan konsep "*capabilities*," yang menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mencapai tujuan dan kebebasan memilih. Ekonomi feminis, dalam hal ini memandang pentingnya pendidikan dan akses terhadap sumber daya sebagai kunci pemberdayaan perempuan. Kabir et al., (2019) menyoroti bahwa kebijakan ekonomi sering kali mengabaikan aspek gender, sehingga penting untuk mendorong analisis gender dalam perumusan kebijakan agar perempuan memperoleh manfaat setara dari pertumbuhan ekonomi dan program pembangunan. Sementara itu, Wei et al., (2021) menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat menilai kontribusi pendapatan perempuan. Dengan demikian, meskipun perempuan menghadapi tantangan, seperti beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, kontribusi mereka memperkaya dinamika ekonomi dan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.4 Beragam Bentuk Partisipasi Ekonomi

Berdasarkan jenis pekerjaan, kontribusi pendapatan perempuan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama:

a. Pekerjaan Formal

Perempuan yang bekerja di sektor formal, seperti pegawai kantor, guru, dan dokter, terlibat dalam pekerjaan yang diatur oleh kontrak dan peraturan yang jelas. Pekerjaan formal ini memberikan stabilitas pendapatan yang lebih tinggi serta jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan hak cuti. Dengan perlindungan ketenagakerjaan ini, perempuan di sektor formal memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui pembayaran pajak, konsumsi rumah tangga, dan investasi dalam pendidikan serta kesehatan keluarga.

b. Pekerjaan Informal

Sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, dan usaha kecil tanpa regulasi formal, menyerap banyak perempuan di negara berkembang. Meski pendapatannya tidak stabil dan kerap tak tercatat dalam statistik resmi, sektor ini berperan vital dalam ekonomi rumah tangga dan lokal. Perempuan di sektor ini sering menjadi tulang punggung keuangan keluarga, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ke pekerjaan formal. Namun, mereka menghadapi ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, dan risiko eksploitasi (Muhammad et al., 2021). Kendati demikian, fleksibilitas waktu yang ditawarkan sektor informal memungkinkan mereka menyeimbangkan peran ekonomi dan domestik.

c. Kewirausahaan

Kewirausahaan perempuan semakin menjadi kontribusi ekonomi penting, terutama dalam usaha kecil dan menengah seperti bisnis kuliner, kerajinan, dan layanan jasa. Selain menciptakan pendapatan bagi keluarga, mereka juga membuka

lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal dan regional (Ge et al., 2022). Wirausahawan perempuan turut mendorong inklusi ekonomi, inovasi pasar lokal, dan pembangunan sosial melalui pemberdayaan komunitas. Muhammad et al., (2021) menyatakan bahwa kewirausahaan perempuan berperan dalam transformasi sosial ekonomi dan menjadi solusi untuk masalah di daerah berpendapatan rendah. Meskipun menghadapi tantangan akses modal dan pasar, banyak perempuan menunjukkan ketangguhan dan kreativitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.1.4 Upah Minimum Kabupaten

2.1.4.1 Definisi dan Gambaran Umum

Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah standar upah terendah yang diwajibkan pemerintah daerah kepada perusahaan untuk pekerja di wilayah tertentu. Konsep ini berakar pada prinsip kesejahteraan ekonomi, menyeimbangkan keadilan pembayaran dengan keberlangsungan usaha. UMK mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dengan memberikan kompensasi yang adil sesuai kontribusi mereka. Sugiyono & Prasetyawati, (2019) menyatakan bahwa penetapan UMK dilakukan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang relevan.

Fajarini et al., (2021) menjelaskan bahwa upah memiliki dua sisi: pertama, bagi pengusaha, upah adalah pembayaran atas jasa fisik atau mental pekerja yang memengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja; kedua, bagi pekerja, upah

terbagi menjadi upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja sebagai imbalan atas tenaga yang digunakan, sementara upah riil mencerminkan kemampuan upah untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), yang mencakup biaya dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja yang mendorong loyalitas dan efisiensi (Ariasih & Yuliarmi, 2021). UMK disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, sementara upah minimum provinsi (UMP) adalah standar umum yang berlaku di seluruh provinsi. UMK biasanya lebih tinggi daripada UMP dan penetapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial di tingkat lokal.

2.1.4.2 Rumus Perhitungan Upah Minimum

Pemerintah telah menerbitkan aturan baru mengenai pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungan upah minimum disampaikan dalam pasal 26 peraturan baru tersebut. Adapun rumus formula perhitungan upah minimum yakni sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)}$$

Keterangan:

- $UM_{(t+1)}$ yakni upah minimum yang akan ditetapkan
- $UM_{(t)}$ adalah upah minimum tahun berjalan

Sementara untuk nilai penyesuaian upah minimum dicari dengan formula berikut:

$$\text{Nilai Penyesuaian } UM_{(t+1)} = (\text{Inflasi} + (PE \times \alpha)) \times UM_{(t)}$$

Simbol α ini merupakan variabel dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30. Dikutip dari Kompas, adapun simbol ini ditentukan nilainya oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: Tingkat penyerapan tenaga kerja rata-rata atau median upah. Faktor lain dalam menentukan simbol ini yakni faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Nantinya jika penyesuaian upah minimum dari perhitungan lebih kecil atau sama dengan nol, maka upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

2.1.4.3 Teori – Teori Upah Minimum

Teori-teori mengenai upah minimum memberikan wawasan terkait mekanisme penetapan dan dampaknya. Adapun diantaranya yaitu:

a. Teori Upah Standar (*Standard Wage Theory*)

Sidney dan Beatrice Webb, pasangan reformis sosialis Inggris, adalah pelopor kelembagaan pasar tenaga kerja dan penentuan upah. Mereka berargumen bahwa upah minimum adalah alat efektif untuk meningkatkan pendapatan pekerja bergaji rendah, dengan pemerintah menetapkan batas untuk mencegah eksploitasi oleh pengusaha (Kaufman, 2013). Teori Upah Standar menekankan pentingnya menetapkan upah minimum agar pekerja memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan hidup dasar. Gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tenaga kerja, sebagai komponen utama produksi, harus menerima upah yang memadai untuk kesejahteraan. Dengan demikian, upah minimum berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja di sektor berisiko upah rendah serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

b. Teori Upah Efisiensi (*Efficiency Wage Theory*)

Teori Upah Efisiensi menyajikan tujuan dari pemberian upah minimum yang lebih tinggi bukan semata untuk melindungi pekerja dari eksploitasi, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Agusalim & Novianti, 2024). Penelitian Shapiro & Stiglitz, (2020) menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi menarik tenaga kerja yang lebih termotivasi, produktif, dan loyal, serta mengurangi pergantian tenaga kerja. Hal ini juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, yang berdampak positif pada produktivitas. Pendukung teori ini, seperti George Akerlof, menambahkan bahwa kompensasi yang memadai memperkuat ikatan emosional antara pekerja dan perusahaan, memberikan manfaat jangka panjang berupa produktivitas lebih tinggi dan pengurangan biaya rekrutmen.

2.1.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMK

a. Inflasi

Inflasi mempengaruhi penetapan UMK karena berdampak pada daya beli masyarakat. Saat inflasi naik, harga barang dan jasa serta biaya hidup meningkat, sehingga pemerintah menyesuaikan UMK agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja. Di Indonesia, inflasi dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencakup perubahan harga barang pokok seperti makanan, transportasi, dan perumahan. Penyesuaian UMK bertujuan menjaga stabilitas daya beli pekerja.

b. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah memengaruhi penetapan UMK, di mana kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi pesat cenderung menetapkan UMK lebih tinggi

dibandingkan kabupaten yang stagnan. Pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan pendapatan daerah dan kemampuan perusahaan memberikan kompensasi lebih. Sebaliknya, di daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah atau krisis, pemerintah daerah lebih konservatif menetapkan UMK untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dan mencegah PHK akibat ketidakmampuan perusahaan membayar upah lebih tinggi.

c. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja mempengaruhi penetapan UMK, karena peningkatan produktivitas memungkinkan perusahaan membayar upah lebih tinggi tanpa mengurangi daya saing. Teori Upah Efisiensi menyatakan bahwa upah lebih tinggi mendorong produktivitas. Jika produktivitas meningkat, misalnya melalui pelatihan atau adopsi teknologi, perusahaan dapat memberikan upah lebih tinggi tanpa mengorbankan daya saing. Selain itu, produktivitas yang tinggi mengurangi biaya produksi per unit, memungkinkan perusahaan tetap kompetitif meskipun terjadi kenaikan upah.

d. Kondisi Sosial-Politik

Kondisi sosial-politik daerah, seperti tekanan dari serikat pekerja, LSM, dan kelompok masyarakat, memengaruhi penetapan UMK. Serikat pekerja sering berperan dalam mengadvokasi kenaikan upah melalui demonstrasi atau negosiasi kolektif yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Dukungan dari organisasi masyarakat atau media lokal memperkuat tuntutan tersebut. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi, khususnya bagi sektor UKM yang kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan UMK yang signifikan.

2.1.4.5 Dampak UMK

a. Dampak Positif

Penetapan UMK yang tepat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL), sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan daya beli. Kebijakan ini juga dapat mendorong produktivitas tenaga kerja, karena upah yang lebih baik meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja. Selain itu, UMK yang lebih tinggi berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di daerah, terutama bagi pekerja di sektor berupah rendah, serta menciptakan redistribusi pendapatan yang lebih adil.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif muncul jika UMK ditetapkan terlalu tinggi. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Perusahaan juga bisa beralih ke otomatisasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, yang mengancam hilangnya pekerjaan dengan keterampilan rendah. Selain itu, perusahaan bisa merelokasi operasional mereka ke wilayah dengan biaya upah yang lebih rendah, yang merugikan ekonomi daerah. Dampak ini paling terasa pada usaha kecil dan menengah yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas.

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk menggali temuan-temuan yang telah ada, serta melihat bagaimana penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah atau memberikan perspektif baru. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chairunnisa & Qintharah, (2022), Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020	Upah minimum kabupaten, kemiskinan, analisis data panel	Lokasi penelitian, cakupan data (2019 - 2022), kesehatan, pendidikan	• Secara bersama kesehatan, pendidikan, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan • Upah minimum tidak berpengaruh pada kemiskinan.	Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA) Doi: https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530
2	Adnan & Amri, (2020), Pemberdayaan Gender, Pendapatan Perempuan, dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Data Panel dari Kawasan Barat Indonesia	Pendapatan perempuan, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2010 – 2018), metode penelitian (HRL), pemberdayaan n gender	• Pendapatan perempuan berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan. • Pendapatan perempuan sepenuhnya memediasi efek pemberdayaan gender pada pengurangan kemiskinan.	Media Ekonomi Doi: https://doi.org/10.25105/me.v28i1.6265
3	Oktaviana et al., (2021), Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah	UMK, pengangguran, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2002 – 2019), metode	• Secara bersama, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh	Jurnal Syntax Idea Doi: https://doi.org/10.46799/syntax-

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Minimum Kabupaten dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Madiun		penelitian, pertumbuhan ekonomi	signifikan pada kemiskinan • Pengangguran tidak secara signifikan mempengaruhi kemiskinan • Upah minimum berpengaruh negatif pada kemiskinan	idea.v3i5.1183
4	Sotomayor, (2021), <i>Can the minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world ? Evidence from Brazil</i>	Upah minimum, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (1995-2015), metode penelitian, distribusi, Kesejahteraan kemiskinan, standar ketenagakerjaan	• Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Brazil	Elsevier <i>World Development</i> Doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105182
5	Sari, (2021), Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Upah minimum, TPT, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2010 - 2019), metode penelitian, jumlah penduduk	• Secara bersamaan, upah, TPT, dan kesehatan mempengaruhi kemiskinan • Upah minimum berdampak negatif terhadap kemiskinan • Tingkat pengangguran terbuka berdampak positif pada kemiskinan	Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Doi: http://dx.doi.org/10.35906/je001.v10i2.785
6	Wulandari & Ratnasari, (2022), Hubungan Pendapatan Perempuan dan Laju	Pendapatan perempuan, kemiskinan, metode penelitian	Lokasi penelitian, cakupan data (2017-2021), laju pertumbuhan ekonomi	• Pendapatan perempuan mengurangi kemiskinan di residensi Surakarta.	Jurnal UNTIDAR Doi: https://journal.untidar.ac.id/index.php/semnas

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Karesiden Kartasura				fe/article/view/536
7	Abda & Cahyono, (2022), Apakah IPM, Pengangguran, dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Surabaya	Pengangguran, pendapatan perempuan, kemiskinan	Cakupan data (2010 - 2020), lokasi penelitian, metode penelitian, IPM	• IPM, pengangguran, dan pendapatan perempuan secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Surabaya. • Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Surabaya. • Pendapatan perempuan tidak secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Surabaya.	Independent: <i>Journal of Economics</i> Doi: https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.43769
8	Fajarini et al., (2021), <i>Open Unemployment Rate And Its Implications On Poverty In Dki Jakarta Province</i>	Upah minimum, TPT, kemiskinan	Penyerapan SDM sektor formal, penyerapan SDM sektor informal, metode penelitian, cakupan data (2012 - 2021), lokasi penelitian.	• Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. • TPT berpengaruh positif terhadap kemiskinan.	Jurnal Belajar dan Pengembangan Diri (Berajah Journal) Doi: https://doi.org/10.47353/bj.v4i5.413
9	Pertiwi & Purnomo, (2022), <i>Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP),</i>	TPT, kemiskinan. metode penelitian	Lokasi penelitian, cakupan data (2017 – 2021), PDRB, IPM	• TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	<i>International Conference on Islamic Economics, Islamic Finance, & Islamic</i>

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Human Development Index (IPM), and Open Unemployment Rate (TPT) on Poverty Rate in Lampung Province.</i>				<i>Law (ICIEIFIL) Analysis</i> Link akses: https://proceedings.ums.ac.id/icieifil/article/view/315
10	Sidebang et al., (2024), <i>The Effect of Minimum Wages and Tax Revenues on Poverty in Indonesia</i>	Upah minimum, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2013 – 2023), metode penelitian, penerimaan pajak	• Upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2013-2023	<i>International Journal for Advanced Research</i> Link akses: https://journal.outlinepublisher.com/index.php/ijar/article/view/204 .
11	Jadoon et al., (2021), <i>Minimum Wages And Poverty : A Cross-Country Analysis</i>	Upah minimum, kemiskinan	Lokasi penelitian, metode penelitian, cakupan data (2000 – 2017), kesehatan, pendidikan, gaya hidup	• Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 11 negara Asia periode 2000-2017	<i>Asian Economic and Financial Review</i> Doi: https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2021.118.632.643
12	Hanifah & Hanifa, (2021), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan	UMK, pengangguran, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2010-2020), metode penelitian, pertumbuhan ekonomi	• Upah minimum berdampak negatif pada kemiskinan. • Pengangguran memiliki efek yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	<i>Independent: Journal of Economics</i> Doi: https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632
13	Herawati & Anas, (2022), Pengaruh Kesenjangan	Pendapatan perempuan, metode penelitian	Lokasi penelitian, cakupan data (2011 –	• Pendapatan perempuan berpengaruh negatif dan	UMS <i>Library</i> Link akses: https://epri

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Gender dan Peran Perempuan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah		2022), ketimpangan gender, pekerja perempuan	signifikan terhadap kemiskinan	nts.ums.ac.id/124222/
14	Susilo et al., (2024), Pendapatan Perempuan terhadap Kemiskina dan Ketimpangan: Bukti Data Panel dari Provinsi Bali	Pendapatan perempuan, metode penelitian, kemiskinan	Lokasi penelitian, cakupan data (2011-2022)	• Pendapatan perempuan berdampak negatif dan tidak signifikan pada tingkat kemiskinan	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA Doi: https://doi.org/10.35870/emt.v8i2.2435
15	Chairunnisa & Qintharah, (2022), Kontribusi Pendapatan Perempuan dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Data Panel di Provinsi Riau	Pendapatan perempuan, metode penelitian	Lokasi penelitian, cakupan data (2011-2022)	• Pendapatan perempuan negatif dan signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi Riau	Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Doi: https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.351

2.2 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah adalah tingkat pengangguran terbuka. TPT mencerminkan ketidakefektifan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja, di mana tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif

terhadap pendapatan per kapita, meningkatkan ketergantungan keluarga, dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga (Fajarini et al., 2021). Fenomena ini berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja juga memainkan peran yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dapat berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan keluarga dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan (Amri et al., 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan perempuan dalam rumah tangga, semakin besar potensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, upah minimum yang memadai berfungsi sebagai pengatur untuk memastikan adanya batas bawah pendapatan yang layak bagi pekerja di sektor formal. UMK yang cukup dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Kusumo, 2023).

Kerangka pemikiran ini mengusulkan bahwa TPT, kontribusi pendapatan perempuan, dan UMK berfungsi sebagai variabel independen yang saling terkait dan memengaruhi tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Penelitian ini fokus pada enam kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, dan Banjarnegara, selama periode 2015-2023. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Dengan pendekatan ini, tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh TPT, kontribusi pendapatan perempuan, dan UMK terhadap tingkat kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka dengan mengkaji literatur yang relevan, termasuk jurnal penelitian sebelumnya serta data statistik resmi. Metode analisis

yang digunakan adalah regresi data panel, yang mengukur dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen (kemiskinan) secara lebih akurat,

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan

Tingkat pengangguran terbuka mencerminkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya. Sementara itu, kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar (Sugiyono & Prasetyawati, 2019). Keduanya saling terkait; meningkatnya pengangguran berdampak langsung pada penurunan pendapatan rumah tangga, yang meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat positif, di mana peningkatan pengangguran cenderung meningkatkan kemiskinan.

Secara teoretis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan ekonomi. Teori Keynesian menyatakan bahwa pengangguran tinggi disebabkan oleh lemahnya permintaan *agregat*, yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Fajarini et al., 2021). Hal ini menurunkan daya beli masyarakat, memperburuk kondisi kemiskinan. Teori Lingkaran Kemiskinan menggambarkan bagaimana pengangguran menciptakan siklus kemiskinan: tanpa pekerjaan, individu kehilangan pendapatan dan semakin sulit keluar dari kemiskinan. Teori Struktural menunjukkan bahwa pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, yang memperburuk kemiskinan. Todaro, (2020) menekankan bahwa pengangguran adalah penyebab utama kemiskinan karena menciptakan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan mengurangi mobilitas ekonomi.

2.2.2 Hubungan Kontribusi Pendapatan Perempuan dengan Kemiskinan

Kontribusi pendapatan perempuan memiliki hubungan erat dengan pengentasan kemiskinan, khususnya dalam konteks ekonomi keluarga dan pembangunan sosial. Hubungan ini bersifat negatif, di mana peningkatan kontribusi pendapatan perempuan cenderung menurunkan angka kemiskinan. Zafar et al., (2024) menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pendapatan rumah tangga dapat mengurangi kemiskinan baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat. Muhammad et al., (2021) menambahkan bahwa pendapatan perempuan sering dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, yang memperbaiki kesejahteraan dan mencegah kemiskinan lintas generasi.

Herawati & Anas, (2022) menekankan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan dengan upah layak meningkatkan stabilitas finansial keluarga. Ge et al., (2022) juga mencatat bahwa pendapatan perempuan memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga dan meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan, yang berimbas pada distribusi sumber daya keluarga. Menurut UN Women, rumah tangga yang bergantung pada kontribusi pendapatan perempuan memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal, meskipun seringkali tidak stabil, memainkan peran vital dalam menopang perekonomian rumah tangga, terutama di pedesaan.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Kabupaten dengan Kemiskinan

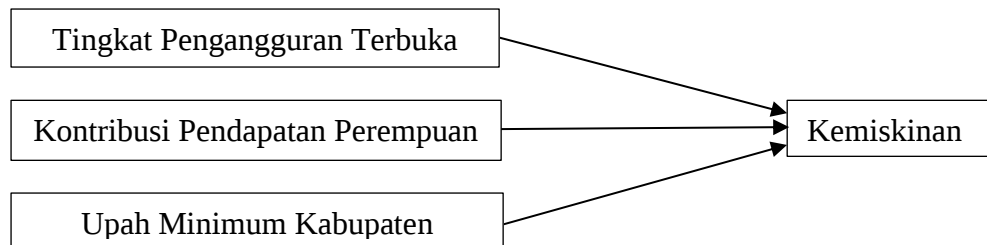
Upah minimum kabupaten (UMK) adalah kebijakan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari upah rendah dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar.

Hubungan antara UMK dan kemiskinan bersifat negatif, di mana peningkatan UMK cenderung menurunkan angka kemiskinan. Secara teori, kenaikan UMK dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, memperkuat daya beli mereka, serta mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar (Fajarini et al., 2021). Teori upah efisiensi juga menjelaskan bahwa upah lebih tinggi meningkatkan produktivitas pekerja dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Agusalim & Novianti, 2024).

Namun, dampak kebijakan UMK tergantung pada kondisi ekonomi lokal, struktur pasar tenaga kerja, dan sektor ekonomi dominan. Menurut ILO, di negara berkembang termasuk Indonesia, UMK yang lebih tinggi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan pekerja. Namun, dampak ini terbatas jika tidak diimbangi peningkatan produktivitas atau jika sebagian besar pekerja berada di sektor informal yang tidak terjangkau kebijakan UMK.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa UMK yang terlalu tinggi dibandingkan produktivitas daerah dapat menyebabkan efek negatif jangka pendek. Oktaviana et al., (2021) menyatakan bahwa kenaikan UMK dapat memaksa perusahaan mengurangi tenaga kerja atau beralih ke mekanisasi, yang meningkatkan pengangguran dan berpotensi memperburuk kemiskinan, terutama di daerah dengan sektor padat karya berproduktivitas rendah. Meski demikian, di beberapa daerah di Indonesia, kebijakan UMK yang diiringi dengan peningkatan investasi, akses pendidikan, dan produktivitas pekerja telah terbukti efektif mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu, maka Kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, hipotesis yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diduga secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif, sedangkan kontribusi pendapatan perempuan dan upah minimum kabupaten berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, dan Banjarnegara Tahun 2015-2023.
- b. Diduga secara simultan tingkat pengangguran terbuka, kontribusi pendapatan perempuan, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap kemiskinan di enam kabupaten di Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, dan Banjarnegara Tahun 2015-2023.